

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KECAMATAN TANJUNG LUBUK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**Winda Nobrilian Sari
07011281520187**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Tahun 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KECAMATAN TANJUNG LUBUK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**WINDA NOBRILIAN SARI
07011281520187**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2019

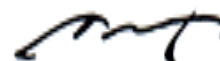
Pembimbing I

**Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002**



Pembimbing II

**Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 23 Mei 2019.

Palembang, 23 Mei 2019

Ketua

1. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002



Anggota

2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



3. Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003



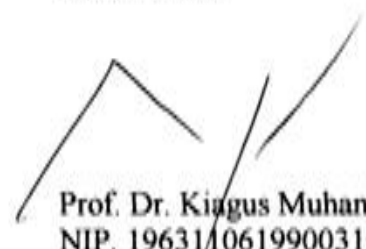
4. Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003




Mengetahui,
Dekan FISIP

ILMU ALAT PENGABDIAN

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Prof. Dr. Kingus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan melakukan sesuatu yang akan membuatmu menyesal dan percayalah pada diri sendiri, lalu bekerja keraslah dalam mencapai mimpimu, karena hidup akan tampak nyata jika dirimu punya mimpi, tak harus selalu menjadi kenyataan karna bangkit berkali-kali saat mengalami kegagalan lebih baik daripada terdiam dan pasrah dalam menjalani hidup, hidup adalah tentang menulis kisah, dan tulislah kisah yang indah” Kim Taeyeon

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT,
Skripsi ini kupersembahkan untuk :*

- 1. Kedua orangtuaku, ayah tercinta Jhoni Wolker dan ibu yang kusayangi Aswanarita, yang selalu membimbing, memberikan dukungan dan bekerja keras untukku.*
- 2. Kakakku Agus Septian dan Adikku Wahyu Prayoga Wardana, yang sangat aku sayangi, terima kasih karena pernah hadir dalam hidupku dan memberikan kenangan yang indah.*
- 3. Keluarga besarku tercinta.*
- 4. Teman seperjuangan Administrasi Publik angkatan 2015.*
- 5. Dan almamaterku yang akan selalu menjadi kebanggaanku.*

ABSTRACT

This research is in background by problems related to the inaccuracy of the targets of the recipients of the Smart Indonesia Program, which are caused by several indicators. This study aims to find out, describe and measure the success of the implementation of the Smart Indonesia Program policy at the high school level in Tanjung Lubuk District. The research method used in this study is a qualitative description method. Sources of data obtained through primary data and secondary data, with data collection techniques used namely observation, interviews and documentation. This study uses policy evaluation theory according to Bridgman and Davis, there are four aspects in measuring the success of policy evaluation, namely input, process, output and outcomes. The results of the study show that the implementation of the Smart Indonesia Program policy has not run optimally. The input aspect is quite clear through clarity and understanding of policy or regulatory indicators, and funds, but the indicators of human resources are still not optimal because there is still a lack of human resources in implementing the program. In the aspect of the process still not running optimally and found various obstacles in the implementation process, this was due to the lack of socialization from both the school and the government regarding the Smart Indonesia Program policy to the target group of programs, data validation or verification process was not carried out invalid. In the output aspect, there were found students who were beneficiaries who were right on target and also some students who had received assistance that were not appropriate. In the aspects of outcomes it was found that the impact felt by students who received assistance from poor families was realized with the help of these students in meeting school needs, but in some students who received assistance but came from capable or not targeted families found inappropriate use of funds with the aim of the program.

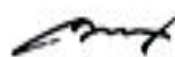
Keywords: *Policy Evaluation, Smart Indonesia Program, High School, Qualitative, Bridgman and Davis*

Pembimbing I



Dr. Nurmah Semil, M.Si
19671201 199203 2002

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si
19621125 198912 1001

Palembang, 23 Mei 2019
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA.
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait masih tidak tepatnya terhadap sasaran dari penerima bantuan Program Indonesia Pintar yang disebabkan oleh beberapa indikator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan mengukur keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar pada tingkat SMA di Kecamatan Tanjung Lubuk. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Bridgman dan Davis, terdapat empat aspek dalam mengukur keberhasilan dari evaluasi kebijakan yaitu *input*, *proses*, *output* dan *outcomes*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari kebijakan Program Indonesia Pintar belum berjalan secara optimal. Pada aspek *input* sudah cukup jelas melalui kejelasan dan pemahaman dari indikator kebijakan atau peraturan, dan dana, namun pada indikator sumberdaya manusia masih belum optimal karena masih kurangnya sumberdaya manusia dalam melaksanakan program tersebut. Pada aspek *proses* masih belum berjalan optimal dan ditemukan berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi baik dari pihak sekolah maupun pemerintah terkait kebijakan Program Indonesia Pintar kepada kelompok sasaran program, proses validasi atau verifikasi data tidak dilakukan secara optimal serta penyampaian informasi yang tidak valid. Pada aspek *output* ditemukan ada siswa penerima bantuan yang tepat sasaran dan juga beberapa siswa penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Pada aspek *outcomes* ditemukan bahwa dampak yang dirasakan oleh siswa penerima bantuan yang berasal dari keluarga miskin sudah terwujud dengan terbantunya siswa tersebut dalam memenuhi kebutuhan sekolah, namun pada beberapa siswa yang menerima bantuan namun berasal dari keluarga mampu atau tidak tepat sasaran ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan dari program.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, Sekolah Menengah Atas, Kualitatif, Bridgman dan Davis

Pembimbing I



Dr. Nurmah Semil, M.Si
19671201 199203 2002

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si
19621125 198912 1001

Palembang, 23 Mei 2019
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA,
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir”**.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan moril maupun materil. Untuk itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Jhoni Wolker dan Ibunda Aswanarita yang telah memberikan dukungan dan selalu mendoakan saya serta menjadi penyemangat bagi saya hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I FISIP UNSRI, Bapak Sofyan Effendi, S.IP,M.Si selaku Wakil Dekan II FISIP UNSRI, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III FISIP UNSRI.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah melayani serta membantu dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Guru serta seluruh staf dan karyawan dari SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk, SMK Negeri 1 Tanjung Lubuk dan SMA Syihabuddin yang telah memberikan informasi, data dan masukan terkait penyusunan proposal skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

Dalam penyajian skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Melalui segala bentuk perhatian dan kerjasama yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih dan juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi terhadap pembaca, Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya dalam dunia pendidikan.

Inderalaya, Mei 2019
Penulis

Winda Nobrilian Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.2 Kebijakan Publik	15
2.3 Evaluasi Kebijakan	17
2.4 Teori Evaluasi Kebijakan	20
2.5 Penelitian Terdahulu	29
2.6 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Definisi Konsep	33
3.3 Fokus Penelitian	34
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	35
3.5 Unit Analisis Data	37
3.6 Informan Penelitian	37

3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.8 Teknik Keabsahan Data	40
3.9 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir	44
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Lubuk.....	48
4.1.3 Gambaran Umum SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk	51
4.1.4 Gambaran Umum SMK Negeri 1 Tanjung Lubuk	69
4.1.5 Gambaran Umum SMAS Syihabuddin	73
4.2 Analisis Evaluasi Kebijakan PIP pada Tingkat SMA di Kecamatan Tanjung Lubuk ...	76
4.2.1 <i>Input</i>	76
4.2.2 <i>Proses</i>	99
4.2.3 <i>Output</i>	133
4.2.4 <i>Outcomes</i>	148
BAB V PENUTUP	167
1.1 Kesimpulan	167
1.2 Saran.....	169
DAFTAR PUSTAKA	170
LAMPIRAN	172

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010-2017	5
1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada Tingkat SMA Tahun 2015-2017	6
1.3 Jumlah Penerima Bantuan PIP di Kecamatan Tanjung Lubuk Tahun 2018	8
1.4 Jumlah Siswa Tidak Mampu yang Menerima dan Tidak Menerima Bantuan PIP	10
1.5 Persentase Siswa Putus Sekolah Pada Tingkat SMA Tahun 2017	12
2.1 Penelitian Terdahulu	31
3.1 Fokus Penelitian	35
4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017..	45
4.2 Jumlah Sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017	46
4.3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Tanjung Lubuk Tahun 2017	49
4.4 Nama-Nama SD di Kecamatan Tanjung Lubuk	50
4.5 Nama-Nama SMP di Kecamatan Tanjung Lubuk	51
4.6 Nama-Nama SMA dan SMK di Kecamatan Tanjung Lubuk	51
4.7 Nama-Nama Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sebagai PNS.....	65
4.8 Nama-Nama Pendidik Non PNS	66
4.9 Nama-Nama Tenaga Pendidikan Non PNS	66
4.10 Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk Setiap Tahunnya	67
4.11 Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah.....	68
4.12 Nama-Nama Guru dan Tenaga Administrasi	70
4.13 Jumlah Siswa SMK Negeri 1 Tanjung Lubuk	72
4.14 Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah.....	72
4.15 Nama-Nama Guru dan Tenaga Pendidikan.....	74
4.16 Jumlah Peserta Didik SMA Syihabuddin.....	75
4.17 Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah.....	75
4.18 Jumlah Dana dan Siswa Penerima PIP di Kecamatan Tanjung Lubuk Tahun 2018	88
4.19 Data Siswa Penerima PIP SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk	137
4.20 Data Siswa Miskin Tidak Mendapat PIP SMK Negeri 1 Tanjung Lubuk.....	138
4.21 Data Siswa SMA Syihabuddin Ketidaktepatan Sasaran Penerima PIP	139
4.22 Rekapitulasi Hasil Analisis Terhadap Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar ..	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
4.1 Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk	53
4.2 Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Tanjung Lubuk	70
4.3 Struktur Organisasi SMA Syihabuddin.....	74
4.4 Kartu Indonesia Pintar.....	79
4.5 Mekanisme Penyaluran Dana PIP	87
4.6 Ruang Tata Usaha	94
4.7 Sosialisasi PIP di Tingkat Pusat	102
4.8 Mekanisme Pengusulan Penerima PIP	110
4.9 Rekapitulasi Data Usulan Siswa Penerima PIP	112
4.10 Cara Menginput Data Siswa yang Memiliki KIP	114
4.11 Cara Menginput Data Siswa Melalui Usulan.....	115
4.12 Pencairan dana PIP oleh Siswa	122
4.13 Pengecekan Status Pencairan Siswa Penerima PIP.....	123
4.14 Pertemuan dengan Orangtua Siswa terkait Pengarahan Penggunaan Dana PIP	124
4.15 Grafik Penerima PIP Tidak Tepat Sasaran SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk	137
4.16 Grafik Siswa Miskin Tidak Menerima PIP SMK Negeri 1 Tanjung Lubuk.....	138
4.17 Grafik Penerima PIP Tidak Tepat Sasaran SMA Syihabuddin.....	139
4.18 Nota Pembelian Barang terkait Penggunaan dana PIP	141
4.19 Persentase Angka Putus Sekolah di Kecamatan Tanjung Lubuk.....	153
4.20 Persentase APM dan APK di Kecamatan Tanjung Lubuk.....	154

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas	172
2. Surat Balasan Izin Penelitian	175
3. Surat Tugas Dosen Pembimbing	178
4. Kartu Bimbingan Skripsi.....	179
5. Kartu Revisi Seminar Proposal	183
6. Kartu Revisi Ujian Komprehensif.....	187
7. Surat Keputusan Skripsi	191
8. Pedoman Wawancara	192
9. Permendikbud RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar	194
10. Permendikbud RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis PIP	203
11. Lampiran Penelitian Surat Keterangan Kepala Sekolah (Pencairan dana)	210
12. Lampiran Penelitian Surat Keputusan Pembagian Tugas	211
13. Lampiran Penelitian Surat Keputusan Penerima PIP dan daftar siswa penerima PIP ...	213

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai atau mengukur seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan (Darwin, 1994 : 34). Evaluasi kebijakan berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan serta kinerja dari kebijakan, khususnya evaluasi pada pelaksanaan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk dapat memahami apa yang terjadi setelah suatu kebijakan dijalankan atau direalisasikan, sehingga dapat dikaji apakah kebijakan tersebut berhasil direalisasikan atau harus dilakukan perbaikan.

Evaluasi ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan dari pelaksanaan suatu kebijakan, evaluasi diperlukan untuk menilai seberapa besar kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi kebijakan penting dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan dengan melihat seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang paling mendasar dari dilakukannya evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja dari kebijakan, serta mencari solusi terhadap kritik atas nilai yang mendasari tujuan, target dan pelaksanaan dari kebijakan.

Evaluasi merupakan suatu cara untuk membuktikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Tujuan dari dilakukannya evaluasi kebijakan adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kebijakan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan dari pelaksanaan kebijakan dimasa yang akan datang. Jadi, evaluasi kebijakan secara singkat bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan tersebut. (Sudjana, 2006 : 48)

Kebijakan yang akan di evaluasi pada penelitian ini adalah kebijakan Program Indonesia Pintar, yang akan difokuskan pada pelaksanaan kebijakan. Kebijakan Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah bagi siswa kurang mampu dalam bentuk pemberian dana bantuan. Program Indonesia Pintar adalah salah satu dari program perlindungan sosial yang dibuat oleh pemerintah melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai program perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang meliputi; Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Pintar sebagai upaya pemerintah untuk mendukung dari pelaksanaan pendidikan nasional, dimana hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam hidup yang memiliki peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Terwujudnya sikap dan perilaku yang baik dari setiap individu merupakan tujuan utama dari sebuah pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan sarana strategis untuk meningkatkan potensi suatu bangsa agar mampu berkiprah dalam tataran yang lebih global. Pendidikan sebagai suatu proses untuk mengembangkan individu dan masyarakat serta menciptakan peradaban bangsa yang bermartabat.

Pendidikan merupakan hak yang paling dasar bagi setiap orang. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan kompetisi. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Sebagai sebuah hak yang hakiki, pengaturan mengenai hak atas pendidikan

diatur dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Ditegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara akan tercapai melalui pendidikan yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap warga negara.

Pengaturan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pasal tersebut bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan ekonominya. Selain itu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) juga disebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik yang kaya maupun yang miskin dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil). Namun kurang meratanya pendidikan di Indonesia terutama akses memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin ataupun terpencil menjadi suatu hambatan bagi seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Masalah pendidikan di Indonesia masih erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab sulitnya seseorang untuk mendapatkan akses pendidikan.

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan nasional di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan yang terjadi menyebabkan salah satunya keterbatasan rakyat untuk memperoleh pendidikan yang layak, padahal pendidikan sangat penting dalam rangka menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 26.580.000 juta orang atau 10,6 % dari total seluruh penduduk di Indonesia. Dalam *United Nations Development Programme* meliris Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada 2017 yaitu 0,694 berada pada peringkat 116 dari 188 negara. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia tersebut dinilai masih cukup memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang di ukur melalui dua indikator yaitu angka melek huruf (AMK) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

Pada tingkat kabupaten, salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki tingkat persentase penduduk miskin yang dinilai masih cukup tinggi. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki jumlah penduduk sebanyak 798.482 ribu jiwa pada tahun 2017 dengan luas wilayah sebesar 19.023,47 km² dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 42 jiwa/km². Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan persentase penduduk miskin sebesar 16,03 %. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari, serta kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Berikut data terkait jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir tercatat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010-2017

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin	
			Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	2010	213.534	116.500	15,98
2	2011	234.558	111.900	15,06
3	2012	244.991	109.900	14,54
4	2013	257.481	121.400	15,82
5	2014	263.395	119.210	15,30
6	2015	274.843	134.070	17,08
7	2016	295.852	127.540	16,03
8	2017	310.341	125.760	15,75

Sumber : Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka, 2017

Pada tabel 1.1 dapat dijelaskan terkait tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimana setiap tahunnya jumlah penduduk miskin mengalami naik turun. Jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat pada tahun 2015 yaitu sebanyak 134.070 jiwa dengan persentase 17,08 %. Lalu pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 127.540 jiwa atau turun sebanyak 1,05 % dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan yaitu Rp. 295.852/bulan. Kemudian pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 125.760 jiwa atau turun sebanyak 0,28 % dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan yaitu Rp. 310.341/bulan. Namun walaupun mengalami penurunan angka, dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 125.760 jiwa dari total keseluruhan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 798.482 jiwa dengan persentase penduduk miskin mencapai 15,75 % terbilang masih sangat memprihatinkan, untuk itu perlu adanya langkah dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan terkait kemiskinan tersebut.

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi dan upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas melalui berbagai usaha seperti pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui

pelatihan, pengadaan buku pembelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan sistem manajemen sekolah. Namun, berbagai indikator mutu pendidikan masih cukup rendah. Salah satunya akibat dari rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok masyarakat miskin yang disebabkan tingginya biaya pendidikan. Pada jenjang pendidikan menengah biaya pendidikan mencapai sekitar 2,5 kali lipat dari biaya untuk jenjang dari pendidikan dasar. Sehingga keadaan tersebut tentunya sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin kejenjang yang lebih tinggi, terutama disebabkan oleh tingginya angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke jenjang SMA/SMK. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 : 1).

Kecamatan Tanjung Lubuk merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jarak ke Ibu Kota Kabupaten \pm 22 km. Kecamatan ini terletak di sebelah Barat Daya Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kayuagung). Dengan luas wilayah 222,97 km² dan jumlah penduduk sebanyak 34.216 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 153 jiwa/km². Gambaran pendidikan di Kecamatan Tanjung Lubuk dapat dilihat melalui angka partisipasi sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) serta perbandingannya dengan angka partisipasi sekolah pada kecamatan lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti Kecamatan Kayuagung, Kecamatan Pedamaran, dan Kecamatan Teluk Gelam.

Tabel 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada Tingkat SMA di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kecamatan Kayuagung, Kecamatan Pedamaran, dan Kecamatan Teluk Gelam Tahun 2015-2017

No	Kecamatan	Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SMA		
		2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1.	Kecamatan Tanjung Lubuk	57,40	60,24	67,79
2.	Kecamatan Kayuagung	69,13	73,29	82,05
3.	Kecamatan Pedamaran	69,20	68,32	78,04
4.	Kecamatan Teluk Gelam	72,07	66,89	80,67

Sumber : Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah pada Kecamatan Tanjung Lubuk dari tahun ke tahun cukup mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya Angka Partisipasi Sekolah pada Kecamatan Tanjung Lubuk dinilai cukup rendah dibandingkan dengan tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2017 pada Kecamatan Kayuagung di tingkat SMA mencapai 82.05 %, sementara itu di Kecamatan Pedamaran mencapai 78.04 %, dan pada Kecamatan Teluk Gelam sebesar 80.67 %, sedangkan pada Kecamatan Tanjung Lubuk hanya mencapai 67.79 %. Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah di Kecamatan Tanjung Lubuk merupakan persentase terendah dibandingkan dengan Kecamatan Kayuagung, Kecamatan Pedamaran, dan Kecamatan Teluk Gelam.

Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan nasional serta upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dimana pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan pemerintah menetapkan program perlindungan sosial, dimana salah satu dari program perlindungan sosial tersebut adalah Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar atau disingkat PIP adalah bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir tahun 2014, pemberian bantuan berupa dana dari program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin atau rentan miskin akan layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan serta menarik peserta didik putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, dimana dijelaskan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik

yang orang tuanya tidak atau kurang mampu untuk membiayai pendidikannya. Besaran dana yang diberikan pemerintah kepada peserta didik penerima bantuan Program Indonesia Pintar sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan besaran dana yaitu Rp500.000,00. Dana bantuan dari Program Indonesia Pintar disalurkan langsung kepada peserta didik penerima bantuan.

Dalam penelitian ini memusatkan penelitian pada evaluasi pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dimana terdapat tiga sekolah menengah atas yaitu SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk, SMK Negeri 1 Tanjung Lubuk, dan SMAS Syihabuddin Tanjung Lubuk yang menjadi lokasi penelitian. Adapun data siswa yang menerima dana bantuan dari Program Indonesia Pintar di Kecamatan Tanjung Lubuk pada tahun 2018.

Tabel 1.3 Jumlah Siswa dan Penerima Dana Bantuan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Tanjung Lubuk Tahun 2018

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Penerima
1.	SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk	689	359
2.	SMK Negeri 1 Tanjung Lubuk	528	245
3.	SMAS Syihabuddin Tanjung Lubuk	164	25
Jumlah		1.381	629

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Pada tabel 1.3 menunjukkan jumlah siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar sebanyak 629 siswa dari total seluruh siswa sebanyak 1.381 siswa pada SMA/SMK di Kecamatan Tanjung Lubuk, artinya hampir setengah dari total seluruh siswa mendapatkan bantuan dana dari Program Indonesia Pintar.

Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar, monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh pihak sekolah dan eksternal oleh dinas pendidikan provinsi yang bertanggung jawab terhadap Program Indonesia Pintar di tingkat SMA. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu berupa :

- 1) Sosialisasi terkait Program Indonesia Pintar kepada satuan pendidikan dan masyarakat di wilayahnya.
- 2) Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan data calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik.
- 3) Mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki KIP sesuai dengan sasaran prioritas dan memutakhirkan data calon penerima dana PIP ke dalam aplikasi Dapodik.
- 4) Menyampaikan data usulan calon penerima dana PIP baik peserta didik pemilik KIP atau tidak memiliki KIP kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- 5) Menginformasikan/menyampaikan Surat Keputusan dan Daftar Peserta Didik Penerima PIP kepada peserta didik.
- 6) Menyampaikan informasi terkait penyaluran dana PIP dan memantau proses pencairan dana PIP.

Kebijakan Program Indonesia Pintar merupakan solusi dari pemerintah untuk dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia sekolah serta menekan angka putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan terhadap pemenuhan biaya pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai saat ini masih ditemukan berbagai masalah yang terjadi. Sehingga perlu dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar, evaluasi tersebut dilakukan untuk dapat mengukur atau menilai terkait sejauhmana suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini yaitu kebijakan Program Indonesia Pintar sebagai solusi dalam mengatasi masalah pendidikan khususnya keterbatasan terhadap akses pendidikan yang disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan. Evaluasi PIP pada tingkat kabupaten/kecamatan untuk jenjang SMA dilakukan dengan mengamati dan menganalisis terkait prosedur atau mekanisme dari pelaksanaan PIP, apakah

sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya untuk nantinya dapat memberikan informasi yang valid tentang hasil dari kebijakan, serta mencari solusi terhadap kritik atas nilai yang mendasari tujuan, target sasaran dan pelaksanaan dari kebijakan PIP. Dalam pelaksanaan program tersebut masih ditemukan berbagai masalah sehingga membuat program ini belum dapat berjalan secara maksimal.

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar salah satunya yaitu masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana PIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana PIP ini. Padahal sejatinya pemerintah meluncurkan program ini untuk membantu siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Berikut data terkait ketidaksesuaian antara penerima bantuan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Tanjung Lubuk.

Tabel 1.4 Jumlah Siswa Tidak Mampu yang Menerima dan Tidak Menerima Bantuan dari Program Indonesia Pintar

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Siswa Tidak Mampu	Jumlah Siswa Penerima PIP	Jumlah Siswa Mampu Penerima PIP	Jumlah Siswa Tidak Mampu Penerima PIP	Jumlah Siswa Tidak Mampu Tidak Menerima PIP
1.	SMAN 1 Tanjung Lubuk	689	314	359	104	255	59
2.	SMKN 1 Tanjung Lubuk	528	234	245	93	152	82
3.	SMAS Syihabuddin Tanjung Lubuk	164	19	25	8	17	2
Jumlah		1.381	567	629	205	424	143

Sumber : Laporan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada tingkat SMA di Kecamatan Tanjung Lubuk

Pada tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa terjadi tidak tepatnya sasaran terhadap penerima bantuan PIP, dimana pada SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk terdapat sebanyak 314 siswa yang tergolong dalam keluarga kurang mampu dari total keseluruhan jumlah siswa sebanyak 689 siswa. Dari 314 siswa kurang mampu tersebut sebanyak 255 siswa tidak mampu terdaftar sebagai penerima PIP dan sisanya sebanyak 59 siswa tidak termasuk sebagai siswa penerima bantuan PIP. Pada SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk sebanyak 359 siswa merupakan penerima bantuan PIP dari jumlah seluruh siswa sebanyak 689 siswa. Dari 359 siswa tersebut sebanyak 104 siswa penerima PIP tergolong sebagai keluarga mampu dan 255 siswa penerima PIP tergolong sebagai keluarga kurang mampu. Artinya dari 359 siswa penerima PIP terdapat 104 siswa penerima PIP yang salah sasaran karena siswa tersebut berasal dari keluarga mampu.

Pada SMK Negeri 1 Tanjung Lubuk terdapat sebanyak 245 siswa penerima PIP dimana ada sekitar 93 siswa penerima PIP yang salah sasaran karena siswa tersebut berasal dari keluarga mampu, dan sekitar 82 siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima PIP dari total keseluruhan siswa tidak mampu sebanyak 234 siswa. Pada SMA Syihabuddin Tanjung Lubuk yang merupakan SMA swasta terdapat dari total keseluruhan jumlah siswa sebanyak 164 siswa terdapat sebanyak 25 siswa yang terdaftar sebagai penerima penerima bantuan PIP. Dimana dari total siswa penerima PIP tersebut terdapat 8 siswa yang tergolong sebagai keluarga mampu.

Dari ketiga sekolah tersebut secara keseluruhan terdapat 629 siswa terdaftar sebagai penerima bantuan PIP, yang diantaranya terdapat 424 siswa penerima PIP yang berasal dari keluarga kurang mampu dan 205 siswa penerima bantuan PIP yang berasal dari keluarga mampu, sehingga hal tersebut menunjukkan terjadi ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program tersebut, karena tidak seharusnya siswa yang berasal dari keluarga mampu menerima bantuan dana PIP. Dimana sejatinya bantuan dari Program Indonesia Pintar

ditujukan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu meringankan tingginya biaya pendidikan.

Disisi lain masalah yang muncul dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu masih tingginya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke SMA. Sejatinya Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*), dan menarik siswa putus sekolah (*drop out*) agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Namun pada kenyataannya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke SMA di Kecamatan Tanjung Lubuk masih cukup tinggi. Berikut data terkait angka putus sekolah di Kecamatan Tanjung Lubuk dan perbandingannya dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tabel 1.5 Persentase Angka Putus Sekolah di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kecamatan Kayuagung, Kecamatan Pedamaran, dan Kecamatan Teluk Gelam Tahun 2017

No	Kecamatan	Angka Putus Sekolah atau Tidak Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang SMA
1.	Kecamatan Tanjung Lubuk	32,21 %
2.	Kecamatan Kayuagung	17,95 %
3.	Kecamatan Pedamaran	21,96 %
4.	Kecamatan Teluk Gelam	19,33 %

Sumber : Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka, 2017

Pada tabel 1.5 menunjukkan bahwa Persentase angka putus sekolah pada tingkat SMA tertinggi yaitu pada Kecamatan Tanjung Lubuk mencapai sebesar 32,21 %, selanjutnya pada Kecamatan Pedamaran mencapai sebesar 21,96 %, pada Kecamatan Teluk Gelam mencapai 19,33 % dan persentase angka putus sekolah terendah yaitu pada Kecamatan Kayuagung sebesar 17,95 %. Kecamatan Tanjung Lubuk merupakan kecamatan yang memiliki persentase angka putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke SMA paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Kayuagung, Kecamatan Pedamaran, dan Kecamatan Teluk Gelam.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada, kebijakan Program Indonesia Pintar dinilai masih belum berjalan sesuai dengan tujuan dari program itu sendiri, dimana masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program maka perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan program. Untuk melihat apakah program ini berjalan sebagaimana mestinya atau sebaliknya, serta adakah dampak yang dihasilkan dari berlangsungnya program ini bagi siswa. Sehingga kebijakan Program Indonesia Pintar dapat memberikan manfaat bagi penerima dana bantuan dan memberikan pendidikan yang layak serta menekan angka putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi siswa tidak mampu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang perlu dikaji pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Program Indonesia Pintar pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun teoritis agar nantinya dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu antara lain :

a. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan belajar bagi mahasiswa, pelaksana dan penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar serta masyarakat pada umumnya, terkait tujuan dan manfaat adanya dari program tersebut.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kecamatan Tanjung Lubuk dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan Program Indonesia Pintar agar berjalan sesuai prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Mengidentifikasi bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar khususnya pada Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 2) Memperkaya pengetahuan untuk perkembangan keilmuan khususnya dalam penerapan kebijakan publik atau program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dimana dalam penelitian ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar untuk memberikan akses pelayanan pendidikan dan mencegah angka putus sekolah serta upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke empat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin, dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agustino Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, Firyal dan Widya, 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan*. Ideas Publishing: Gorontalo.
- Azwar. 2005. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kecamatan Tanjung Lubuk Dalam Angka*. Kayuagung: Mustika Karya.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka*. Kayuagung: Mustika Karya.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Undip Press.
- Duun, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Farida, Ida. 2008. *Evaluasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Nasional*. Bandung: Rosdakarya.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias. 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sukardi. 2010. *Evaluasi Pendidikan, Prinsip dan Operasional*. Jakarta : Bumi Aksara

Tirtarahardja Umar. 2008. *Pengantar Pendidikan*. Bandung : Rineka Cipta

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Ressindo.

Jurnal

Akbar, Muhammad. 2006. Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2006, 2 (1) 51-53. (<http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/download/1521/848>) diakses pada 9 Januari 2019 Pukul 19.33 WIB

Muryadi, Agustanico. 2017. Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah*, 2017, 3 (1) 4-9. (<http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/download/538>) diakses pada 23 Desember 2018 Pukul 15.00 WIB

Novia, Saraswati. 2017. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 2017, 5 (4) 40-48. (<http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/2017/11>) diakses pada 15 November 2018 Pukul 19.10 WIB

Wahyudhiana, dan Darodjat. 2015. Model Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal Islamadina*, 2015, 14 (1) 2-9. (<http://Journal.uny.ac.id/index.php/article/publications>) diakses pada 22 Desember 2018 Pukul 20.05 WIB

Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 05/D/BP/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah